

STRATEGI TIONGKOK DALAM MERESPON PEMBENTUKAN PAKTA AUKUS

Aji Ridha Tiara Mawarni¹

Abstract: Australia, the United Kingdom, and the United States (AUKUS) is a trilateral defense pact initiated by three major countries in the world, namely Australia, the United Kingdom, and the United States. On September 15, 2021. The idea of AUKUS was also formed to focus on cutting-edge technologies in the field of security and defense, particularly in the development of quantum technology. The cooperation also has a plan that will involve information exchange, underwater capability development, and can be mutually beneficial in developing the security industrial base. The AUKUS pact itself is expected to enhance collective capabilities in the security sector, especially in the mission of preventing Chinese expansionism, especially in the Indo-Pacific region. From the United States' point of view, AUKUS is seen as a strategy of the United States to maintain its dominance in international relations, particularly regarding competition between the United States and China, through the achievement of sea power. The purpose of this study is to determine China's strategy in responding to the formation of the AUKUS pact.

This research is a type of qualitative research using descriptive research methods, data collection techniques using literature studies whose data sources are secondary data sources because they are obtained through books, journals and also the internet. In addition, this research uses Neorealism and Balance of Power theories which are used to identify existing problems so as to reach the stage of making decisions.

The results of the study found that China's strategy in responding to the establishment of the AUKUS pact is to carry out a Speech Act such as open criticism to emphasize that the AUKUS agreement is harmful to many parties. This is also supported by China's strong statement that the agreement between the three countries is a new model of Western provocation. China considers AUKUS to be a threat to regional security, especially in the Indo-Pacific region. China's military modernization has also been strengthened by aggressive military activity with its closest ally, Russia.

Keywords: AUKUS, Strategy, China, Response, Military

Pendahuluan

Australia, United Kingdom, and United States (AUKUS) merupakan pakta pertahanan trilateral yang diinisiasi oleh tiga negara besar di dunia, yaitu Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada 15 September 2021, tiga pejabat tinggi negara, yaitu Scott Morrison (Perdana Menteri Australia), Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris), dan Joseph Biden (Presiden Amerika Serikat) resmi membentuk kerja sama keamanan yang dikenal dengan AUKUS. Pakta pertahanan tersebut memiliki tujuan untuk kerja sama keamanan melalui rencana kolaborasi dalam mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, khususnya untuk Australia (Office, 2021). Ide AUKUS juga dibentuk untuk fokus pada teknologi mutakhir di bidang keamanan dan pertahanan, khususnya dalam pengembangan teknologi kuantum. Kerja sama ini juga memiliki rencana yang akan melibatkan pertukaran informasi, pengembangan kemampuan bawah air, dan dapat

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : tayara939@gmail.com.

saling menguntungkan dalam mengembangkan basis industri keamanan. Pakta AUKUS sendiri diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kolektif di sektor keamanan, khususnya dalam misi mencegah ekspansionisme Tiongkok, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

AUKUS juga dapat menjadi potensi yang menggiurkan bagi Inggris, terutama di bidang industri seperti pembuatan kapal dengan teknologi tinggi. Selain itu, AUKUS juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan citra Inggris di kancah internasional dengan kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat perhatian keamanan baru bagi Inggris dan membantu Australia sebagai mitra untuk menjaga stabilitas kawasan di Kawasan Indo-Pasifik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi Amerika Serikat, AUKUS merupakan peluang strategis untuk meminimalisir pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat juga memandang bahwa keberadaan AUKUS dapat menjadi acuan utama bagi pemerintahan Biden dalam misinya membentuk kemitraan yang lebih kuat di sektor keamanan guna menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan Indo-Pasifik (Din Aulia & Sahide, 2022).

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mempublikasikan National Security Strategic Guidance pada awal 2021 yang menekankan pada sikap Tiongkok yang semakin agresif. Dalam panduan tersebut, Presiden Biden menyebut Tiongkok sebagai satu-satunya kompetitor yang memiliki kapabilitas dalam mengkombinasikan kekuatan ekonomi, diplomasi, militer, dan teknologi hingga menimbulkan tantangan bagi sistem internasional yang stabil dan bebas (Outlook, 2021).

Hal ini tentu saja terkait dengan meningkatnya ancaman Tiongkok di kawasan, sehingga Amerika Serikat dan sekutunya perlu memandang kawasan IndoPasifik sebagai kawasan penting bagi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan Amerika Serikat. Sementara itu, Australia sendiri memahami bahwa keterlibatannya dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam pembentukan AUKUS telah menjadikan Australia sebagai negara yang akan menerima bantuan transformasi teknologi berupa kapal selam bertenaga nuklir sehingga pembentukan AUKUS sangat bermanfaat bagi Australia untuk melindungi nilai-nilai bersama serta memajukan keamanan dan kemakmuran dengan negara tersebut di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pakta pertahanan itu menciptakan harapan dan keyakinan yang tinggi bagi Australia untuk terlibat lebih jauh dalam menjaga stabilitas regional di tengah meningkatnya ancaman keamanan, terutama dari Tiongkok (Brooke-Holland et al., 2021).

Australia akan mendapatkan keuntungan keamanan dengan bergabung dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam pakta AUKUS. Dalam hal ini, Australia akan mendapatkan fasilitas pertahanan berupa kapal selam bertenaga nuklir yang memiliki kemampuan tinggi dengan kecepatan, jangkauan, dan daya tahan yang lebih canggih dan secara signifikan lebih canggih dibandingkan armada bertenaga konvensional lainnya.

Hal ini menjadikan Australia sebagai modal penting untuk menyeimbangkan Tiongkok dalam hal kemampuan militer untuk setidaknya memberikan perlawanan akibat paksaan ekonomi yang diberlakukan oleh Tiongkok. Pakta AUKUS juga memberi kesempatan bagi Australia untuk memperluas pengaruhnya dalam lingkup regional melalui kerja sama dengan negara-negara yang lebih besar. Pakta AUKUS tidak hanya terfokus pada kerja sama pertahanan, tetapi juga pengembangan teknologi yang tidak mampu Australia kembangkan sendiri, seperti kapabilitas siber, artificial intelligence, teknologi kuantum, dan kapabilitas bawah laut. Australia, sebagai middle

power, dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian secara mandiri dan mengeluarkan biaya pembangunan yang besar.

Karenanya, dengan kerja sama melalui pakta AUKUS, Australia dapat mengakses teknologi dari Amerika Serikat dan Inggris untuk kemudian mengembangkan teknologi dalam negeri milik Australia sendiri (Wilkins, 2021). Dari sudut pandang Amerika Serikat, AUKUS dilihat sebagai strategi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya dalam hubungan internasional, khususnya terkait persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, melalui pencapaian sea power (Cheng, 2022).

Kerangka Teori

Teori Neorealisme Defensif

Neorealisme defensif berasal dari teori realisme struktural yang pertama kali dikembangkan oleh Kenneth N. Waltz dalam tulisannya yang berjudul *Theory of International Politics*. Secara garis besar, realisme struktural menyatakan bahwa sistem internasional yang anarki, ditambah dengan distribusi kapabilitas yang tidak merata, menjadi batasan bagi sikap negara terhadap negara lain. Dalam situasi yang anarki, keamanan negara merupakan tujuan utama. Hanya jika negara berhasil bertahan hidup dalam sistem yang anarki, negara dapat mencapai tujuan lainnya, seperti ketentraman, keuntungan, dan kekuasaan (Waltz, 1979).

Waltz menyatakan bahwa walaupun negara selalu berupaya untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya, tetapi fokus utama dari negara adalah untuk mempertahankan posisinya dalam sistem, dimana hal tersebut hanya dapat dicapai ketika keamanan negara telah terpenuhi (Waltz, 1979). Bagi realisme defensif, sistem internasional dinilai tidak memberikan keuntungan bagi negara untuk melakukan ekspansi melalui agresi. Hal tersebut karena agresi mendorong munculnya security dilemma yang membuat negara khawatir akan pengaruh dari intensi dan kekuasaan negara lain terhadap negaranya di masa mendatang (Taliaferro 2000). Lebih lanjut, security dilemma dapat memicu respons yang ofensif dari negara lain sehingga menggagalkan upaya negara untuk meningkatkan keamanannya, membuat agresi justru menjadi tidak produktif (Lobell, 2017).

Oleh karena itu, negara cenderung fokus pada keamanan dirinya sendiri dibandingkan melakukan kebijakan yang ofensif terhadap negara lain. Dalam hal ini, realisme defensif beranggapan bahwa kebijakan yang moderat merupakan kebijakan yang lebih tepat untuk mencapai keamanan negara. Umumnya, negara akan menerapkan kebijakan yang mengikat melalui ekonomi ataupun diplomasi, dibandingkan dengan militer (Jervis 1978). Jika negara memutuskan untuk melakukan kebijakan yang agresif, keputusan tersebut cenderung dipengaruhi oleh variabel domestik ataupun unit, misalnya dengan adanya persepsi pemimpin (Lobell, 2017).

Teori Balance of Power

Perilaku negara dalam hubungan internasional bersumber dari sifat dasar manusia yang berupaya untuk bertahan hidup. Seperti halnya manusia, negara juga memiliki tujuan yang egois, yakni untuk mempertahankan hidupnya dalam sistem internasional yang anarki. Hal tersebut karena dalam sistem yang anarki, tidak ada pemerintahan universal yang berperan dalam mempertahankan jalannya tatanan dan hukum internasional. Dengan kata lain, negara harus bergantung pada dirinya sendiri karena tidak ada aktor lain yang akan membantu ketika negara mengalami kesulitan. Untuk itu, negara pun berupaya untuk memaksimalkan kekuasaan dan kapabilitasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, teori balance of power kemudian menjelaskan keberadaan negara dalam sistem self-help, dimana tidak ada negara yang dapat membantu negara lain yang lemah atau mencegah suatu negara melakukan hal yang mengancam negara lain untuk mencapai tujuannya (Waltz 1979). Hal itu mendorong negara untuk memiliki kecenderungan meningkatkan kekuasaannya sebesar mungkin. Keinginan negara untuk memperoleh kekuasaan, baik untuk mempertahankan ataupun menggulingkan status quo, yang selanjutnya menciptakan kondisi balance of power (Morgenthau,1973). Teori balance of power berangkat dari asumsi bahwa negara merupakan aktor individual yang berupaya untuk mencapai tujuannya. Cara tersebut dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu upaya internal, misalnya dengan meningkatkan kapabilitas militer dan ekonominya, atau upaya eksternal, misalnya dengan membentuk aliansi untuk memperkuat diri atau melemahkan lawan (Waltz,1979).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pembentukan Pakta AUKUS

Kemanan kawasan Asia-Pasifik didasari oleh ‘kerja sama’ yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dimana balance of power di antara kedua negara berkontribusi besar dalam stabilnya domain keamanan di Asia-Pasifik. Untuk menjaga stabilitas kawasan, AS menggunakan kekuatan militer dan pengaruh politiknya untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi di kawasan tersebut atau yang dapat mempengaruhi aliansinya di Asia-Pasifik, sehingga kepentingannya di kawasan tersebut pun tidak terganggu. Di sisi lain, kebijakan Tiongkok ditekankan pada pembangunan nasional yang terfokus pada lingkup internal (Hass, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, stabilitas kawasan Asia-Pasifik mulai terganggu dengan adanya perubahan sikap dari kedua aktor tersebut, khususnya pada Tiongkok yang mulai melakukan modernisasi dan meningkatkan kapabilitas militernya. Kondisi itu diperburuk dengan sikap AS yang justru secara terang-terangan meningkatkan kerja samanya dengan Taiwan, yang secara tidak langsung menandai penolakan AS terhadap pengaruh Tiongkok di Asia (Hass, 2020). Peningkatan kapabilitas Tiongkok, yang dinilai mempengaruhi dominasi Amerika Serikat di Asia-Pasifik serta memberikan ancaman bagi negara-negara di sekitarnya, selanjutnya direspons melalui kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat, Australia, dan Inggris melalui mekanisme AUKUS. Keputusan itu diambil untuk mempertahankan status quo di kawasan Asia-Pasifik.

Pakta AUKUS juga membantu Australia untuk meningkatkan kapabilitas militernya dengan lebih maksimal. Di samping itu, kerja sama dengan negara-negara besar juga mendukung ekspansi pengaruh dari Australia di kawasan Asia-Pasifik. Terlebih dengan keikutsertaan AS dan Inggris, Australia pun secara tidak langsung mendapatkan jaminan keamanan dari kedua negara tersebut, karena negara lain pun akan cenderung menghindari konflik dengan negara-negara tersebut (Wilkins, 2021).

Bagi Amerika Serikat AUKUS dapat dilihat sebagai upaya yang dilakukan AS untuk mempertahankan hegemoninya, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Oleh karena itu, melalui AUKUS, AS bertujuan untuk meningkatkan kekuatan maritimnya dengan

mempertahankan akses terhadap perairan yang terbuka dan bebas untuk mempermudah mobilisasi personel militer AS, terlebih karena posisi geografis AS yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selain itu, kerja sama antara AS dengan negara yang letak geografisnya jauh, seperti Australia, justru memberikan pengaruh lebih besar bagi AS karena secara tidak langsung AS dapat memproyeksikan kekuatan militernya di kawasan Australia pula (Cheng, 2022).

Bagi Inggris, keterlibatan Inggris dapat dilihat sebagai upaya untuk merealisasikan kepentingan Inggris di Indo-Pasifik pasca Brexit. Hal itu juga untuk mendukung AS sebagai mitra terdekat Inggris. Inggris ingin menunjukkan pada AS bahwa Inggris merupakan mitra yang dapat diandalkan, khususnya dalam tujuan AS untuk menghambat ekspansi pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik (Wright, 2021). Inggris sendiri menyatakan bahwa Tiongkok telah menunjukkan hambatan bagi tatanan internasional yang layak, baik dalam bentuk hambatan keamanan ataupun nilai dan norma. Oleh karena itu, Inggris ingin meningkatkan keamanan nasionalnya dari Tiongkok, sembari mencapai kepentingannya untuk meningkatkan presensi di Indo-Pasifik (Hawkins, 2023).

Walaupun AUKUS tidak secara langsung menyebutkan tentang Tiongkok, tetapi Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara kerja sama AUKUS dengan konflik yang mungkin terjadi dalam sengketa wilayah Taiwan. Hal itu menunjukkan kekhawatiran negara-negara anggota AUKUS terhadap kemungkinan terjadinya konflik dengan Tiongkok terkait Taiwan. Dalam skenario konflik antara Tiongkok dengan AS terkait Taiwan, Inggris dan Australia sebagai negara AUKUS memiliki komitmen untuk membantu AS dalam konflik tersebut.

a. Rencana dan Tindakan AUKUS

Pada tanggal 14 maret tahun 2023, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendeklarasikan joint statement yang di publikasikan pada web resmi milik perdana menteri Australia dan juga web resmi dari Gedung putih (The White House) yang berjudul "*Joint Leaders Statement On AUKUS*" dan "*Australia-United States Joint Leaders' Statement An Alliance for our Times*" yang berisikan tentang pembaruan rencana atau Tindakan yang di ambil di masa mendatang oleh AUKUS seiring mereka memperkuat Aliansi untuk merespon tantangan yang terus berkembang.

Tiongkok Sebagai Kekuatan Global Baru

Negara great power adalah negara yang mempunyai karakteristik yaitu kekuatan militer dan ekonomi yang maju, mempunyai pengaruh diplomatik dan budaya yang dapat mempengaruhi small power untuk mempertimbangkan pendapat great power sebelum mengambil tindakan. Banyak pengamat hubungan internasional yang berpendapat bahwa negara Tiongkok masuk dalam salah satu Negara great power. Perkembangan pesat yang dilakukan oleh Tiongkok telah menarik perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir. Implikasi kebangkitan Tiongkok terlihat dari berbagai bidang diantaranya dari perluasan pengaruhnya dan militer.

Tujuan utama bagi setiap negara terutama great power adalah untuk mempertahankan eksistensi dirinya (survival). Tiongkok merupakan salah satu negara great power yang memiliki potensi untuk menjadi hegemon di kawasan Asia dan juga dunia. Sebagai negara great power, yang dilakukan Tiongkok adalah untuk bisa

bertahan dalam sistem internasional yang anarki dan membantu dirinya sendiri agar tidak menjadi korban dari agresi negara lain.

Dalam beberapa dekade terakhir, salah satu negara dengan perkembangan yang paling pesat dalam politik global adalah Tiongkok. Peningkatan pengaruh Tiongkok dalam lingkup internasional dimulai sejak bergabungnya negara tersebut dalam World Trade Organization (WTO) pada akhir tahun 2001 (WPR, 2023). Dengan keterlibatan Tiongkok dalam WTO, Tiongkok tidak hanya memperluas pasarnya yang semula terbatas tanpa kontribusi WTO, tetapi negara tersebut juga perlahan berhasil mempengaruhi rantai pasokan global. Dengan demikian, Tiongkok pun mampu menjadi salah satu mitra utama bagi negara-negara lain di bidang ekonomi, membuatnya secara tidak langsung memiliki pengaruh dalam politik internasional, khususnya bagi negara-negara ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada ekonomi Tiongkok.

Pertumbuhan Tiongkok sebagai kekuatan global baru dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, Tiongkok mampu memanfaatkan situasi kolonialisme yang dialaminya sebelumnya untuk memperluas jaringan kerja sama, khususnya dalam ekonomi. Kedua, Tiongkok mampu memanfaatkan karakter sosialis yang kuat dari negaranya dan memproyeksikan karakter tersebut ke dalam kebijakan untuk pembangunan ekonomi nasional. Karakter itu juga membuat sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Tiongkok, dengan anggapan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama. Tiongkok pun mengirimkan lebih dari 300 juta tenaga kerja dari wilayah pinggiran atau pedesaan ke kota untuk bekerja di sektor ekspor. Saat ini, Tiongkok merupakan negara dengan kapasitas militer terbesar di dunia, dengan anggaran militer sebesar USD 219 miliar pada tahun 2022, atau dua kali lebih banyak dibandingkan dengan anggaran militer Tiongkok pada tahun 2012. Dengan peningkatan anggaran yang signifikan, Tiongkok dianggap sebagai negara dengan modernisasi militer terbesar sejak Perang Dingin. Pada sektor angkatan laut, Tiongkok merupakan angkatan laut terbesar, mengalahkan Amerika Serikat, jika dilihat dari jumlah kapal yang dimiliki. Pada sektor angkatan udara pun, kapabilitas Tiongkok merupakan terbesar ketiga di dunia dan dinilai perlahan memiliki kualitas yang sama dengan negara-negara barat (Schuman, 2023).

Peningkatan kekuatan militer Tiongkok mendorong Tiongkok untuk bersikap lebih agresif, khususnya di wilayah sekitar negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan klaim '*Nine Dash Line*' yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menentukan batas wilayah maritim berdasarkan aspek sejarah yang diakui oleh Tiongkok. Mendukung klaim tersebut, Tiongkok menolak untuk terlibat dalam penyelesaian kasus di Mahkamah Internasional terkait perbatasan wilayah. Padahal, klaim Tiongkok melalui *Nine Dash Line* dinilai telah melanggar *UN Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) terkait kebebasan navigasi di domain maritim (Zhao, 2016).

Selain itu, Tiongkok juga meningkatkan aktivitas militernya di kawasan maritim Asia Timur, khususnya di wilayah sekitar Taiwan. Walaupun tidak memproyeksikan kekuatan militernya dalam lingkup global, Tiongkok memiliki militer yang kuat jika dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitarnya. Kondisi tersebut, bersamaan dengan minimnya komitmen Amerika Serikat dalam bidang pertahanan di Asia ditandai dengan sedikitnya jumlah personel militer yang dikerahkan Amerika Serikat di Asia menjadi salah satu faktor tumbuhnya pengaruh Tiongkok sebagai kekuatan baru. Bahkan, Amerika Serikat telah menunjukkan penurunan upaya militer bagi aliansi-aliansinya di Asia, yang selanjutnya memberi ruang bagi Tiongkok untuk memperluas

pengaruhnya. Secara tidak langsung, perubahan *balance of power* pun dapat terjadi dalam kondisi tersebut (Schuman, 2023).

Strategi Tiongkok Dalam Merespon Pembentukan Pakta AUKUS

Tiongkok, menanggapi perjanjian trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, melakukan *Speech Act* seperti kritik terbuka untuk menekankan bahwa perjanjian AUKUS berbahaya bagi banyak pihak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan keras Tiongkok yang menilai bahwa kesepakatan ketiga negara tersebut merupakan model baru provokasi Barat. Tiongkok sendiri menilai AUKUS dapat menjadi ancaman bagi keamanan kawasan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

AUKUS sendiri merupakan bentuk kesepakatan trilateral untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Namun, bagi Tiongkok, hal ini akan mengganggu stabilitas kawasan dan merusak perdamaian kawasan. Lijian Zhao, juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, menekankan bahwa perjanjian tersebut dapat memicu perlombaan senjata karena tindakan AUKUS dapat merusak prinsip nonproliferasi internasional. Lebih lanjut, Zhao menganggap upaya Amerika Serikat dan sekutunya sebagai tindakan standar ganda yang tidak bertanggung jawab karena menggunakan ekspor penggunaan nuklir sebagai bagian dari rencana permainan geopolitik (Shinkman, 2021). Tiongkok sendiri menilai konsep yang ditawarkan Washington dapat merusak prinsip keterbukaan dan non-eksklusivitas di kawasan Indo-Pasifik. Lebih-lebih lagi, Tiongkok memandang sudut pandang Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah program kebijakan luar negeri yang diprakarsai oleh Tiongkok, yaitu BRI. Bahkan Tiongkok menuding model yang ditawarkan Amerika Serikat hanya akan mengganggu konsep kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Bagi Tiongkok, kecenderungan Amerika Serikat terhadap konstruksi geopolitik baru dengan komponen militer merupakan upaya Washington untuk menciptakan mentalitas perang dingin baru di kawasan Indo-Pasifik (Denisov et al., 2021).

Tiongkok juga secara masif melakukan *speech act* melalui kampanye ke dunia internasional masyarakat tentang bahaya aliansi AUKUS. Hal ini terlihat dari upaya Tiongkok yang menuduh perjanjian AUKUS melanggar NPT (*Non-Proliferation of Nuclear Weapons*) karena akan melakukan transfer senjata nuklir secara ilegal selama pertemuannya dengan dewan IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Tiongkok juga memandang aliansi AUKUS berusaha membujuk IAEA untuk menghapuskan proliferasi nuklir. Bahkan Tiongkok mulai meragukan dan mempertanyakan legitimasi, integrasi, dan mandat IAEA dalam menyelesaikan isu bahan nuklir untuk perjanjian AUKUS (Murphy, 2022).

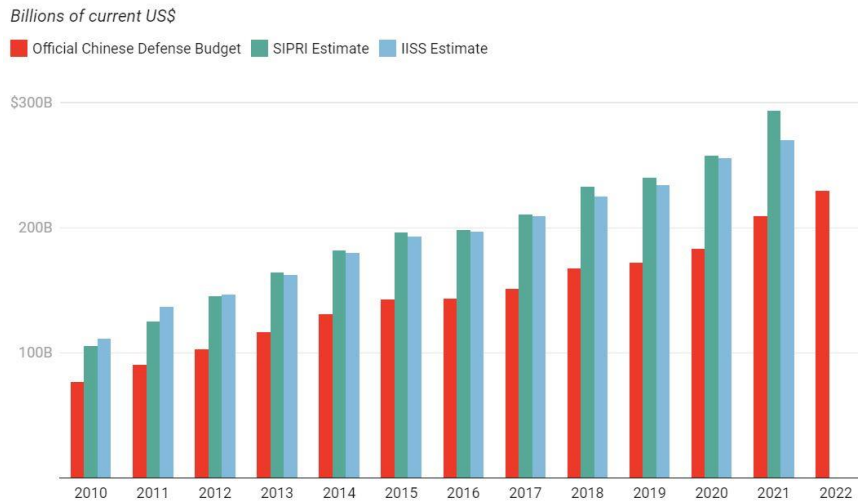
Modernisasi Militer Tiongkok Menyikapi Kehadiran AUKUS

Modernisasi militer yang dilakukan Tiongkok merupakan bukti nyata keinginan besar Tiongkok untuk mencapai status negara adidaya. Salah satu tahapan awal yang menjadi faktor pendukung untuk mencapai hal tersebut adalah kekuatan maritim. Dalam hal ini, Tiongkok memahami bahwa kekuatan suatu negara maritim tidak hanya dilihat dari kekuatan armada angkatan laut yang kuat tetapi juga membutuhkan infrastruktur militer dan logistik yang kuat seperti kapal *coast guard* yang memiliki kemampuan unggul, angkatan laut yang kuat, armada kapal dagang yang besar dan industri militer kelas dunia.

Bagi Tiongkok, hal ini bertujuan untuk mencegah ancaman eksternal yang akan dihadapi Beijing, terutama ketika terjadi perselisihan dengan negara lain. Selain itu, modernisasi militer besar-besaran Tiongkok adalah pesan yang ingin disampaikan oleh

masyarakat internasional bahwa Tiongkok mulai mempersiapkan diri sebagai negara adidaya maritim.

Gambar 1 Estimasi Pengeluaran Sektor Pertahanan Tiongkok
Estimates of Chinese Defense Spending

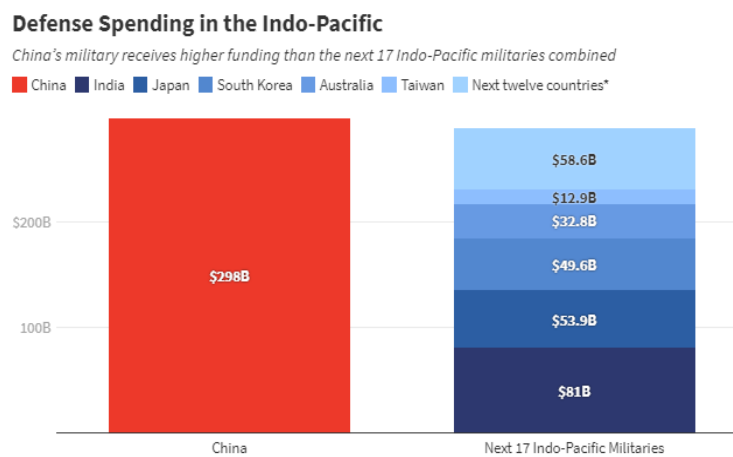


Source: CSIS China Power Project; Chinese Central Government; SIPRI; IISS

Sumber: CSIS (n.d.)

Pada tahun 2022, pembukaan sesi tahunan Kongres Rakyat Tiongkok(NPC) telah menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah secara resmi mengumumkan peningkatan pengeluaran pertahanan negara sebesar 7,1% untuk 1,45 triliun yuan atau setara dengan \$230 miliar dalam rancangan laporan anggaran negara. Angka ini dinilai realistis bagi Beijing untuk terus mendukung program modernisasi militernya.

Gambar 2 Perbandingan Anggaran Pertahanan Tiongkokvs Negara-Negara di Kawasan Indo-Pasifik



Note: Figures are in billions of US\$ (constant 2021).
 *Includes Pakistan, Singapore, Indonesia, Thailand, Bangladesh, the Philippines, Malaysia, New Zealand, Myanmar, Sri Lanka, Cambodia, and Brunei
 Source: CSIS China Power Project; SIPRI

Sumber : CSIS (n.d)

Data yang dikutip dari *CSIS China Power Project* telah menunjukkan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok. Tindakan yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan anggaran pertahanan merupakan respons untuk mendukung modernisasi militer. Hal ini dinilai penting dalam mencegah intervensi

asing dalam isu keamanan regional dan internasional, terutama mengenai kedaulatan negara. Selain itu, peningkatan anggaran pertahanan juga didukung oleh beberapa program modernisasi militer lainnya seperti program pengadaan, reformasi militer, hingga program perubahan doktrinal baru terkait strategi perang *People's Liberation Army* (PLA). Dalam perkembangannya, peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok dalam dua dekade terakhir belum mampu menandingi Amerika Serikat yang telah menghabiskan \$767,8 miliar atau hampir tiga kali lipat anggaran Beijing pada tahun 2021. Ini juga menunjukkan bahwa ada kepentingan yang berbeda dalam militer untuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Perbedaan kepentingan tersebut dapat dilihat dari pola Amerika Serikat yang lebih cenderung mempertahankan status negara adidaya atas kemampuan militer secara global. Sementara itu, Tiongkok berfokus pada keamanan regional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik (ChinaPower, 2022).

Modernisasi militer Tiongkok juga diperkuat dengan agresifnya aktivitas militer yang dilakukan bersama sekutu terdekatnya, Rusia. Hal ini terlihat dari kegiatan latihan bersama 10 armada kapal perang yang terdiri dari 5 kapal perang milik Tiongkok dan sisanya milik Rusia di kawasan Pasifik barat. Bagi Tiongkok, kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi strategis komprehensif yang dilakukan Beijing dan sekutunya Moskow. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional bersama armada militer kedua negara. Rusia juga mendukung hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa latihan militer bersama tersebut merupakan bukti komitmen Rusia dan Tiongkok dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik (Lendon, 2021).

Kesimpulan

AUKUS adalah singkatan dari dan juga merupakan pakta kerja sama pertahanan strategis yang dilaksanakan oleh Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang diumumkan pada 15 September 2021. Di samping itu, pakta AUKUS juga ditujukan untuk mempererat kerja sama antara ketiga negara di kawasan Indo-Pasifik, yang mana menurut ketiga negara tersebut peningkatan pengaruh Tiongkok dianggap sebagai ancaman di kawasan.

Sebagai pengaturan berbagi informasi dan teknologi tiga arah, termasuk komitmen pertama kali oleh Amerika Serikat untuk berbagi teknologi propulsi nuklir dengan sekutu selain Inggris, AUKUS menyoroti secara tajam skala yang dirasakan dari ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mempublikasikan National Security Strategic Guidance pada awal 2021 yang menekankan pada sikap Tiongkok yang semakin agresif.

Berdasarkan hasil penelitian terkait strategi Tiongkok dalam merespon pembentukan pakta AUKUS diperoleh hasil sebagai berikut, Kehadiran AUKUS sebagai wadah kerjasama baru di bidang keamanan tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada tahun 2021 telah menimbulkan berbagai reaksi di dunia internasional. Berbagai reaksi dari pro dan kontra pun membuat isu AUKUS menjadi sorotan topik penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat internasional. Salah satu yang paling menentang kehadiran AUKUS sebagai akronim dari kerja sama pertahanan dan keamanan, yakni Tiongkok.

Tiongkok menanggapi perjanjian trilateral AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, melakukan *Speech Act* seperti kritik terbuka untuk menekankan bahwa perjanjian AUKUS berbahaya bagi banyak pihak. Hal ini juga didukung oleh pernyataan keras Tiongkok yang menilai bahwa kesepakatan ketiga negara tersebut merupakan model baru provokasi Barat. Tiongkok sendiri menilai AUKUS dapat

menjadi ancaman bagi keamanan kawasan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Serta, Modernisasi militer Tiongkok juga diperkuat dengan agresifnya aktivitas militer yang dilakukan bersama sekutu terdekatnya, Rusia. Karena bagi Tiongkok, kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi strategis komprehensif yang dilakukan Beijing dan sekutunya Moskow.

Daftar Pustaka

- Brooke-Holland, L., Curtis, J., Mills, C., & Garraway, A. (2021). The AUKUS Agreement. October, 1–27. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9335/ChinaPower>. (2022). What Does Tiongkok Really Spend on its Military? /
- CFR, n.d. *China's Approach to Global Governance*. [Online] Available at: <https://www.cfr.org/china-global-governance/>
- ChinaPower Project. <https://chinapower.csis.org/military-spending/>
- Cheng, M. 2022. AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>.
- CSIS. (n.d.). What Does Tiongkok Really Spend on its Military? Retrieved Februari 6, 2023, from <https://chinapower.csis.org/military-spending/>
- Din Aulia, J., & Sahide, A. (2022). *Regional Stability Rivalry in the Indo Pacific Region: China's Interests in Responding the AUKUS Trilateral Pact*. 9(9).
- Denisov, I., Paramonov, O., Arapova, E., & Safranchuk, I. (2021). Russia, China, and the concept of Indo-Pacific. *Journal of Eurasian Studies*, 12(1), 72–85. <https://doi.org/10.1177/1879366521999899>
- Hass, R., 2020. *U.S.-Tiongkok Relations: The Search for a New Equilibrium*. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/02/FP_2020026_us_china_relations_hass.pdf
- Hawkins, A., 2023. *'Path of error and danger': Tiongkok angry and confused over Aukus deal*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2023/mar/16/outrage-confusion-china-rea>
- Lendon, B. (2021). Why Russian and Chinese warships teaming up to circle Japan is a big deal | CNN. <https://edition.cnn.com/2021/10/25/asia/china-russia-naval-flotilla-circles-japan-intl-hnkml/index.html>
- Lendon, B. (2021). Why Russian and Chinese warships teaming up to circle Japan is a big deal | CNN. <https://edition.cnn.com/2021/10/25/asia/china-russia-naval-flotilla-circles-japan-intl-hnkml/index.html>
- Lobell, Steven E. 2017. "Structural Realism/Offensive and Defensive Realism." Oxford Research Encyclopedia of International Studies. doi:10.1093/acrefore/9780190846626.013.304.

- Morgenthau, Hans J. 1973. *Politics Among Nations*. New York: Knopf.
- Murphy, F. (2022). China, AUKUS countries clash at IAEA over nuclear submarine plan | Reuters. <https://www.reuters.com/world/china-aukus-countries-clash-iaea-over-nuclear-submarine-plan2022-09-16/>
- Office, P. M. (2021). UK, US AND Australia launch new security partnership - GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/uk-us-and-australia-launch-new-security-partnership>
- Outlook. 2021. China's Actions Constitute A Threat to Regional Peace in Indo-Pacific: Pentagon. <https://www.outlookindia.com/website/story/world-news-chinas-actions-constitute-a-threat-to-regional-peace-in-indo-pacific-senior-pentagon-official/377746>.
- Schuman, M., 2023. *Tionggok Could Soon Be the Dominant Military Power in Asia*. [Online] Available at: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2023/05/china-military-size-power-asia-pacific/673933/>
- Shinkman, P. D. (2021). Tionggok Fires Back at 'AUKUS' Alliance With Violent Rhetoric: Australian Troops Would Be the First to Die. <https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2021-09-16/china-fires-back-aaukus-alliance-with-violent-rhetoric-australian-troops-would-be-the-first-to-die>
- Waltz, Kenneth N. 1979. "Anarchic Structures and Balances of Power." In *Theory of International Politics*. Boston, U.S.: Addison-Wesley Publishing Company.
- WPR, 2023. *How a Rising Tionggok Has Remade Global Politics*. [Online] Available at: <https://www.worldpoliticsreview.com/how-a-rising-china-has-remade-global-politics/>
- Zhao, S., 2016. Tionggok as a Rising Power Versus the US-led World Order. *Rising Powers Quarterly*, 1(1), pp. 13-21.